



**PENETAPAN**

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Anak (Asal-usul anak) oleh:

**PEMOHON I ASLI**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai  
“PEMOHON I”;

dan

**PEMOHON II ASLI**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai  
“PEMOHON II”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor register 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 11 Maret 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017 dan dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Rt.01 Rw.01 Desa Sareng kecamatan Geger Madiun, dengan dengan wali nikah bernama: Sodik dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu H. Edi Supeno dan Muhajir dengan

Hlm. 1 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa: Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Rt.01 Rw.01 Desa Sareng kecamatan Geger Madiun hingga sekarang, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Lavina Afra Talita**, Umur 2 tahun 8 bulan;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sah pada 05 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dengan wali nikah bernama: Sodik dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu H. Edi Supeno dan Muhajir dengan mas kawin berupa: Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Agustus 2017 Nomor : 0278/001/VIII/2017;

5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;

6. Bahwa para Pemohon hendak memperbaharui akta kelahiran **Lavina Afra Talita**, Umur 2 tahun 8 bulan, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Lavina Afra Talita**, Umur 2 tahun 8 bulan, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I ASLI**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II ASLI**) yang menikah sah pada tanggal 05 Agustus 2017 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Agustus 2017 Nomor : 0278/001/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :470/20191217/402.101/2019 Tanggal 17-12-2019,NIK: 3519030104990003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :470/20020607/402.101/2020 Tanggal 18-02-2020,NIK: 3519034810980001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah

Hlm. 3 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519030407180003 Tanggal 17-12-2019, NIK: 3519030104990003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0278/001/VIII/2017 Tanggal 07-08-2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Lavina Afra Talita Nomor : 472.11/80/402.404.16/2020 Tanggal 10-03-2020, NIK: 3519030104990003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Keterangan atas nama Lavina Afra Talita Nomor : 470/70/402.404.16/2020 Tanggal 10-03-2020 dari Kantor Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

## B. Saksi-saksi:

1. SAK  
SI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi Ayah Kandung Pemohon II;

Hlm. 4 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Lavina Afra Talita, lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada bulan Juni 2017, di rumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Sodik;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Edi Supeno dan Muhajir dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah sirri para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Lavina Afra Talita;
- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Agustus 2017 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah sah belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

2.

SAK

SI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Lavina Afra Talita, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri

Hlm. 5 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada bulan Juni 2017, di rumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Sodik, yang menjadi saksi pernikahan adalah H. Edi Supeno dan Muhajir dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Lavina Afra Talita;
- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Agustus 2017 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hlm. 6 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama **Lavina Afra Talita , lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017** dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak-anak para Pemohon yang bernama **Lavina Afra Talita , lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017**, terlahir akibat adanya perkawinan sah para Pemohon secara sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon, sehingga di dalam Surat Keterangan Kelahiran Anak tersebut tertulis anak dari seorang ibu bernama **PEMOHON II ASLI**;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4), (P5) dan (P6) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai

Hlm. 7 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal **05 Agustus 2017**, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I ASLI (Pemohon I), bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II ASLI (Pemohon II) dan bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I ASLI (Pemohon I) telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Rt.01 Rw.01 Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Minimbang, bahwa bukti (P5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Lavina Afra Talita , lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017** yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa **Lavina Afra Talita , lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017** adalah anak pertama perempuan dari ibu PEMOHON II ASLI (Pemohon II) tanpa menyebut PEMOHON I ASLI (Pemohon I) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah sirri/di bawah tangan pada tanggal 15 Juni 2017 **dirumah orangtua Pemohon II (Madiun)**, dengan wali nikah **ayah kandung Pemohon II** bernama Sodik dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu H. Edi Supeno dan Muhajir dan dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: **Lavina Afra Talita , lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017**,

Hlm. 8 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada **05 Agustus 2017** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah orangtua Pemohon II (Madiun), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sodik dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu H. Edi Supeno dan Muhajir;
- Bahwa dari perkawinan sirri/di bawah tangan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Lavina Afra Talita, lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017 tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran sebagai anak dari ibu PEMOHON II ASLI (Pemohon II) saja tanpa menyebut nama PEMOHON I ASLI (Pemohon I) sebagai ayah;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan/perwalian para Pemohon sendiri sebagai orangtuanya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal **05 Agustus 2017** Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Agustus 2017 Nomor: 0278/001/VIII/2017 ;

Hlm. 9 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Juni 2017 tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama **Lavina Afra Talita**, lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017 tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan sah para Pemohon secara *syar'iy*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak-anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Hlm. 10 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع،  
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد  
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من  
أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama **Lavina Afra Talita, lahir di Madiun, tanggal 09-07-2017** untuk ditetapkan sebagai anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon, maka permohonan

Hlm. 11 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal dari undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hlm. 12 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **Lavina Afra Talita**, lahir Madiun, tanggal 09 Juli 2017 adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON I ASLI**) dan Pemohon II (**PEMOHON II ASLI**);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

ttd

**Sihabudin, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 10.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |
| 6. PNPB              | : Rp. | 20.000,-  |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama  
Kabupaten Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 491.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm.

Pntp. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)